



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 5 September 2023
Waktu	: 13.30 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022; 2. Laporan Pelaksanaan Anggaran TA 2023; 3. Pembahasan RKA K/L TA 2024.
Ketua Rapat	: Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si.,
Sekretaris Rapat	: Dicky Rachmadi, S.A.P.
Hadir	: 1. 15 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri PP&PA RI (I Gusti Ayu Bintang Darmawati); 3. Jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka kembali Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si., dengan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda "**Evaluasi Pelaksanaan Anggaran KemenPPPA TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran KemenPPPA TA 2023 dan Pembahasan RKA K/L KemenPPPA RI TA 2024**" dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan KemenPPPA Tahun Anggaran 2022 dan capaian peringkat 1 (satu) serapan Anggaran Tahun 2022 dari 34 (tiga puluh empat) Kementerian.
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2022 berdasarkan data OM SPAN Kemenkeu per tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp. 242.428.323.019 (*dua ratus empat puluh dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan belas rupiah*) atau sebesar 99,19%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Sekretariat Kementerian	127.925.432.000	126.828.636.532	99,14
2	Deputi Kesetaraan Gender	22.497.683.000	22.286.046.578	99,06
3	Deputi Perlindungan Hak Perempuan	26.752.968.000	26.529.947.082	99,17
4	Deputi Partisipasi Masyarakat	12.512.382.000	12.342.388.728	98,64
5	Deputi Perlindungan Khusus Anak	23.865.681.000	23.764.510.873	99,58
6	Deputi Pemenuhan Hak Anak	17.641.280.000	17.600.336.643	99,77
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai)	13.215.816.000	13.076.456.583	98,95
Jumlah		244.411.242.000	242.428.323.019	99,19

3. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang perubahan Pagu Anggaran KemenPPPA Tahun 2023 dari Rp. 288.403.485.000,- menjadi Rp. 286.393.485.000,- akibat penarikan Automatic Adjustment Kemenkeu RI sebesar Rp.2.010.000.000,- dan adanya realokasi Anggaran KemenPPPA TA 2023 akibat proses penghapusan SOTK Deputi Partisipasi Masyarakat sesuai Perpres No.7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 65 Tahun 2020 Tentang KemenPPPA, dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Pagu Semula (ribuan)	Pagu Menjadi (ribuan)	Penambahan / Pengurangan	% Perubahan
----	--------	----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------

1	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	24.779.632	27.698.015	2.918.383	11,78%
2	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	23.907.264	27.061.975	3.154.711	13,20%
3	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	13.282.963	205.984	(13.076.979)	-98,45%
4	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	32.828.486	34.813.605	1.985.119	6,05%
5	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	37.425.153	39.563.072	2.137.919	5,71%
6	Sekretaris Kementerian	142.199.855	143.070.702	870.847	0,61%
7	KPAI	13.980.132	13.980.132	-	0,00%
Jumlah		288.403.485	286.393.485	(2.010.000)	-

4. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2023 berdasarkan data OM SPAN Kemenkeu per tanggal 1 September 2023 sebesar Rp. 158.731.465.873 (*seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*) atau sebesar 55,42%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Sekretariat Kementerian	141.934.263.000	80.272.500.601	56,56
2	Deputi Kesetaraan Gender	24.779.632.000	12.974.959.529	52,36
3	Deputi Perlindungan Hak Perempuan	32.828.486.000	19.935.194.684	60,73
4	Deputi Partisipasi Masyarakat	11.412.063.000	201.264.722	1,76
5	Deputi Perlindungan Khusus Anak	37.425.153.000	22.509.842.816	60,15
6	Deputi Pemenuhan Hak Anak	24.033.756.000	14.175.088.681	58,98
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai)	13.980.132.000	8.662.614.840	61,96
Jumlah		286.393.485.000	158.731.465.873	55,42

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk meningkatkan serapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

5. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2024 sebesar

Rp.309.653.311.000,- (tiga ratus sembilan milyar - enam ratus lima puluh tiga juta - tiga ratus sebelas ribu rupiah), mengalami peningkatan sebesar **Rp.35.670.000.000,-** (tiga puluh lima milyar – enam ratus tujuh puluh juta rupiah) atau 13% (tiga belas persen) dari Pagu Indikatif tahun 2024 sebelumnya sebesar **Rp.273.983.311.000,-** (dua ratus tujuh puluh tiga milyar - sembilan ratus delapan puluh tiga juta - tiga ratus sebelas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Rincian Pagu Rancangan Renja Tahun 2024			
		Operasional	Non Operasional		Jumlah
			Prioritas Nasional (PN)	Non PN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
1	Sekretariat Kementerian	113.331.299	-	24.873.114	138.204.413
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	2.350.654	17.362.000	4.148.244	23.860.898
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2.161.942	16.874.000	5.230.500	24.266.442
4	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	2.048.742	6.193.830	5.770.000	14.012.572
5	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2.194.994	38.135.400	6.530.000	46.860.394
6	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2.943.120	41.265.340	4.260.000	48.468.460
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	8.385.123	2.650.000	2.945.009	13.980.132
JUMLAH		133.415.874	122.480.570	53.756.867	309.653.311

Pada postur Anggaran KemenPPPA Tahun 2024 tersebut akan disesuaikan mengikuti proses administrasi di Kemenkeu RI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

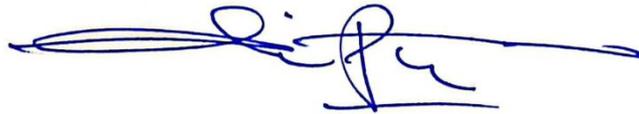
6. Komisi VIII DPR RI akan mendalami penambahan anggaran KemenPPPA Tahun 2024 bersama pejabat Eselon I dari usulan kegiatan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional sebesar Rp.16.620.000.000,- (enam belas milyar – enam ratus dua puluh juta rupiah) pada Deputi Bidang Perlindungan hak Perempuan dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja sebesar Rp.19.050.000.000,- (sembilan belas milyar – lima puluh juta rupiah) pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak.
7. Komisi VIII DPR RI memahami anggaran DAK Non Fisik KemenPPPA Tahun 2024 sebesar Rp.132.000.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar rupiah) dengan cakupan daerah penerima menjadi 305 daerah dari sebelumnya 275 daerah.
8. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

- a. Bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait dalam rangka meningkatkan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak terutama pencegahan TPPO terhadap anak dan perempuan.
- b. Melakukan pendampingan korban tindak pidana pelecehan seksual di tempat kerja khususnya dikawasan industri.
- c. Mendorong agar segera menerbitkan regulasi turunan terkait UU TPKS untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak secara maksimal.
- d. Mendorong lahirnya regulasi bagi perlindungan perempuan yang menikah dengan WNA khususnya terkait hak asuh anak.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si.,